

**Pengaruh Corporate Governance, Intensitas Modal, dan
Diversifikasi Gender Terhadap *Tax Avoidance***
**(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Periode
2014-2016)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Risfa Rulmadani
No. Mahasiswa: 14312555

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**Pengaruh Corporate Governance, Intensitas Modal, dan Diversifikasi
Gender Terhadap *Tax Avoidance***

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Periode 2014-2016)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Risfa Rulmadani
No. Mahasiswa: 14312555

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 10 September 2018

Penulis



(Risfa Rulmadani)

**Pengaruh Corporate Governance, Intensitas Modal, dan
Diversifikasi Gender Terhadap *Tax Avoidance*
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Periode 2014-
2016)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Risfa Rulmadani
No. Mahasiswa: 14312555

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal ..10.. Sept ..2018

Dosen Pembimbing,



(Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, INTENSITAS MODAL, DIVERSIFIKASI
GENDER TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Disusun Oleh : **RISFA RULMADANI**

Nomor Mahasiswa : **14312555**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 16 Oktober 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo, SE., M.Bus

Penguji : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman *jahiliyah* yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Corporate Governance, Intensitas Modal, dan Diversifikasi Gender Terhadap Tax Avoidance”** disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana (S1).
2. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Sigit Handoyo, S.E., M, Bus selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan bijaksana selalu memberikan dorongan, arahan, serta motivasi, dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk Bapak.

4. Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orang tua saya, Bapak Wahyu Abdani dan Ibu Rachmawaty Sanusi serta adik-adikku yang selalu menjadi penyemangat dan menginspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan restu yang selalu diberi.
6. Sahabat-sahabatku Bella, Mutia, Tari, Yoriza, Nancy, Jeje , Kiky dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih karena selalu mengingatkan dan menjadi penyemangat untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu, berpartisipasi, dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.

Penulis menyadari dalam penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi bahasa maupun isinya, oleh sebab itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi untuk kebaikan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 September 2018

Penulis

(Risfa Rulmadani)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Keagenan	12
2.1.2 Teori Feminisme	13
2.1.3 Penghindaran Pajak.....	16
2.1.4 Corporate Governance	20
2.1.5 Intensitas Modal.....	25
2.1.6 Diversifikasi Gender.....	25
2.1.7 Profitabilitas.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	31
2.4 Hipotesis Penelitian	32
2.4.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	32
2.4.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	33
2.4.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	34
2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan	36
2.4.5 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	37
2.4.6 Pengaruh Diversifikasi Gender Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Populasi dan Sampel	40
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	41
3.3.1 Variabel Dependen.....	41
3.3.2 Variabel Independen	42
3.3.3 Variabel Kontrol	45
3.4 Metode Analisa Data.....	45
3.4.1 Analisis Deskriptif	45
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.4.3 Uji Hipotesis	47
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	50
4.3. Uji Asumsi Klasik.....	54
4.3.1. Uji Normalitas.....	54
4.3.2 Uji Multikolinearitas	55
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	57
4.4 Analisis Regresi Berganda.....	58
4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	61
4.4.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F).....	62
4.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	63
4.5. Pembahasan.....	66
4.5.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	66
4.5.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	67
4.5.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	68
4.5.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	69
4.5.5 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	71
4.5.6 Pengaruh Diversifikasi Gender Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. ...	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	76
5.3 Implikasi Penelitian	77
DAFTAR REFERENSI	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	49
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif Statistik	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	58
Tabel 4.6 Hasil Analisis Berganda	59
Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinasi	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)	62
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis	63

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Daftar Perusahaan Sampel
- Lampiran 2 : Hasil Perhitungan ETR
- Lampiran 3 : Hasil Perhitungan PDKI
- Lampiran 4 : Jumlah Komite Audit
- Lampiran 5 : Daftar Anggota Auditor
- Lampiran 6 : Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional
- Lampiran 7 : Hasil Perhitungan Intensitas Modal
- Lampiran 8 : Daftar Diversifikasi Gender
- Lampiran 9 : Hasil Perhitungan ROA
- Lampiran 10 : Hasil Analisis Deskriptif Statistik
- Lampiran 11 : Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 12 : Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 13 : Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 14 : Hasil Uji Autokorelasi
- Lampiran 15 : Hasil Analisis Regresi Berganda
- Lampiran 16 : Hasil Pengujian Hipotesis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan, untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan, untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak perusahaan, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan, untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak perusahaan dan untuk mengetahui pengaruh diversifikasi gender terhadap penghindaran pajak perusahaan

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia sedangkan sampel penelitian ini adalah 15 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel selama periode penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Analisis data digunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, intensitas modal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan dan diversifikasi gender berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Kata Kunci : GCG, intensitas modal, gender, dan penghindaran pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze to determine the effect of independent commissioners on corporate tax avoidance, to determine the influence of the audit committee on corporate tax avoidance, to determine the effect of audit quality on corporate tax avoidance, to determine the effect of institutional ownership on corporate tax evasion, to determine the effect of intensity capital for corporate tax avoidance and to determine the effect of gender diversification on corporate tax avoidance

The population in this study were all mining companies in the Indonesia Stock Exchange while the sample of this study were 15 manufacturing companies that met the sample criteria during the study period. The sampling technique in this study uses purposive sampling method. Data analysis used multiple regression analysis.

The results of this study prove that the proportion of independent commissioners has a significant negative effect on corporate tax avoidance, the audit committee has no significant effect on corporate tax avoidance, audit quality has a significant negative effect on corporate tax avoidance, institutional ownership has no significant effect on corporate tax avoidance, capital intensity has a negative effect significant to corporate tax avoidance and gender diversification have a significant negative effect on corporate tax avoidance.

Keywords: GCG, capital intensity, gender, and tax avoidan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sebagaimana telah tertulis pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa, sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya. Sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya/beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan suatu kewajiban, dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (Wibawa, Wilopo, & Abdillah, 2016).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam literatur manajemen perpajakan secara umum dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Wijaya (2016) juga sampai saat ini cara penghindaran pajak sendiri bukanlah hal yang melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan dengan cara memanfaatkan celah pajak (*tax*

loopholes) untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bukanlah tanpa sengaja. Praktik penghindaran pajak juga bahkan sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan profit. Dari kebijakan pimpinan dan tujuan tersebut, strategi untuk melakukan penghindaran pajak yang merupakan bentuk efisiensi pembayaran pajak dilakukan pihak manajemen sebuah perusahaan dimana yang berkewajiban mengelola dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dibantu oleh beberapa staf pajak (Zahirah, Nurazlina, & Rusli, 2017).

Beberapa perusahaan di Indonesia telah melakukan penghindaran pajak. Sebagai contoh dari hasil pemeriksaan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tahun 2005, diikuti pemeriksaan pajak tahun 2007 dan 2008 dikarenakan pada tahun-tahun tersebut Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak dan meminta negara melakukan restitusi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan pajak, petugas pajak menemukan bahwa telah terjadi penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun melalui *transfer pricing*. Dengan modus sederhana, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang otomotif tersebut memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar (Sugiharto, 2014).

Sugiharto (2014) dalam Tempo menyatakan sejumlah temuan tersebut mengindikasikan bahwa Toyota Indonesia menjual mobil-mobil produksi mereka ke Singapura dengan harga tidak wajar pada dokumen laporan pajak Toyota pada tahun 2007. Sepanjang tahun itu, Toyota Motor Manufacturing di Indonesia tercatat mengekspor 17.181 unit Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota sendiri, petugas pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan atau *cost of goods sold* (COGS) fortuner itu adalah Rp 161 juta per unit. Anehnya, dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49 persen lebih murah dibandingkan nilai tersebut. Artinya, Toyota Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil itu ke Singapura.

Temuan yang sama juga terlacak pada penjualan mobil Innova diesel dan Innova bensin, yang masing-masing dijual lebih murah 1,73 persen dan 5,14 persen dari ongkos produksinya per unit. Pada ekspor Rush dan Terios, Toyota Motor Manufacturing memang meraup untung, tapi tipis sekali yakni hanya 1,15 persen dan 2,69 persen dari ongkos produksi per unit.

Pemeriksa pajak lalu mengkoreksi harga pada transaksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada Toyota Motor Asia Pacific di Singapura. Hasilnya fantastis omzet penjualan Toyota Motor Manufacturing pada 2007 jadi melonjak hampir setengah triliun dari laporan awal perusahaan itu. Nilainya sekarang menjadi Rp 27,5 triliun. Petugas pajak kemudian memeriksa laporan keuangan Toyota Manufacturing pada 2008. Modus ekspor dengan nilai tak wajar juga berulang pada tahun itu. Koreksi serupa

dilakukan dan ternyata nilai omzet Toyota tahun itu melonjak dari 1,7 triliun menjadi Rp 34,5 triliun.

Kasus terbaru juga terjadi menjelang pertengahan tahun 2016, munculnya kasus besar “*Panama Papers*” yang merupakan contoh nyata juga terdapat penggelapan pajak secara global yang telah menjadi sorotan dunia. Kebocoran sebuah dokumen finansial berskala besar telah membongkar pihak-pihak yang telah melakukan aksi penggelapan pajak. Beberapa upaya penggelapan pajak yang dilakukan pihak-pihak tersebut dengan mengatur dana yang dimilikinya dengan mentransfer sejumlah dana yang besar dan mendirikan sejumlah perusahaan bayangan dimana tidak adanya kegiatan proses bisnis di wilayah-wilayah surga bebas pajak (*tax havens country*). Dalam Tempo Silalahi, dkk. (2016) menyatakan total catatan yang terbongkar mencapai 11,5 juta dokumen perusahaan cangkang (*shell company*) yang menjadi klien dari *Mossack Fonseca*. Keberadaan semua data ini memberikan petunjuk bagaimana *Mossack Fonseca* sebagai firma hukum di negara Panama bekerjasama dengan bank untuk menjajakan kerahasiaan finansial pada politikus, penipu, mafia narkoba, miliuner, selebritas dan bahkan sampai ke bintang olahraga kelas dunia. Kasus untuk “*Panama Papers*” di atas dilakukan tidak hanya orang pribadi tetapi juga oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena adanya peluang besar yang bisa dimanfaatkan.

Salah satu penyebab maraknya kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah lemahnya sistem *good corporate governance*. Kajian Pricewaterhouse

Coopers atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki urutan paling bawah untuk transparansi dan keterbukaan (Irawan & Farahmita, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena penerapan *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Zulkarnaen (2015) juga menyatakan bahwa dengan adanya *corporate governance* diharapkan dapat mengatasi *agency problem* yang terdapat dalam perusahaan. Beberapa penelitian yang membuktikan bahwa *good corporate governance* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti Wibawa et al. (2016) membuktikan dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, penelitian Zahirah et al. (2017) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Irawan & Farahmita (2012) membuktikan GCG berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Ristadelvina & Puspaningsih (2017) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Ngadiman & Puspitasari (2014) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Utari &

Supadmi (2017) membuktikan komite audit, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan Maraya & Yendrawati (2016) membuktikan bahwa kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian diatas, terdapat ketidakkonsistenan hasil pada pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak terutama pada variabel komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional.

Faktor lainnya yang diprediksi mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah intensitas modal. Intensitas modal adalah tingkat perbandingan investasi perusahaan aset tetap terhadap total aset. Aset tetap (kecuali tanah) memiliki beban penyusutan yang merupakan beban yang diakui dalam perpajakan sehingga akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Dalam aset terdapat aset tetap yang mengalami penyusutan (kecuali tanah) yang diakui dalam perpajakan sehingga perusahaan berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak (Dewi, Nasir, & Hariadi, 2016). Hasil penelitian Dharma & Ardiana (2016) menunjukkan hasil bahwa variabel intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian Dewi et al. (2016), Puspita & Febrianti (2017), Mulyani, Darminto, & Wi Endang (2014) dan Okrayanti, Utomo, & Nuraina (2017) membuktikan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain GCG dan intensitas modal, perbedaan gender di perusahaan dapat menawarkan satu set manfaat sebagai tambahan pengetahuan, ide-ide baru dan wawasan untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan perencanaan strategis, pengetahuan baru atau pendapat dan pengalaman (Ridwan, Zaitul, & Yulistia, 2015) salah satunya adalah penghindaran pajak ((Khumairoh, Solikhah, & Yulianto, 2017). Khaoula & Mohamed Ali (2012) berpendapat terkadang perusahaan melewatkan berbagai bakat dan pengalaman perempuan ketika mewakili perusahaan. Hal ini mengakibatkan posisi perempuan pada dewan puncak menjadi minoritas, selama dekade terbaru telah ada minat yang meningkat pada *gender* eksekutif puncak dan direksi di perusahaan. Persentase perempuan dalam posisi manajemen puncak masih sangat rendah di kebanyakan negara. Peningkatan prosentase wanita dalam eksekutif perusahaan memberikan dampak berbagai keputusan perusahaan termasuk dalam bidang perpajakan (Winasis, Nur, & Yuyetta, 2017). Hasil penelitian Khaoula & Mohamed Ali (2012), Khumairoh et al. (2017) dan Winasis et al. (2017) membuktikan diversifikasi gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan Ridwan et al. (2015) membuktikan diversifikasi gender tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adanya inkonsistensi dalam penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian ulang terhadap pengaruh GCG, intensitas modal, terhadap penghindaran pajak dengan periode penelitian yang terbaru. Situasi ekonomi yang berbeda pada periode penelitian terdahulu tentu

cukup memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan periode terbaru. Selain itu penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan di BEI pada tahun 2014-2016. Alasan pemilihan perusahaan pertambangan karena Beberapa peristiwa di Indonesia yang muncul di permukaan terkait penghindaran pajak menurut PWYP (Publish What You Pay) yang dikutip oleh (Maraya & Yendrawati, 2016), sepanjang periode 2013-2014 negara kehilangan Rp 235,76 triliun akibat praktik pengelakan pajak oleh perusahaan tambang. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak, sekitar 24 persen dari 7.834 perusahaan tambang tidak ber-NPWP dan sebanyak 35 persen tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
5. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

6. Apakah diversifikasi gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak perusahaan
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan
5. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak perusahaan
6. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi gender terhadap penghindaran pajak perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait, diantaranya adalah:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak

2. Bagi penelitian berikutnya

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan dan informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan gambaran atau sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara garis besar latar belakang masalah dari tax avoidance pada perusahaan di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan beberapa konsep dan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini juga tertuang kerangka pemikiran yang menguraikan pengaruh variabel *corporate governance*, intensitas modal dan diversifikasi gender terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Kemudian akan diperoleh hipotesis sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah mengenai pengaruh variabel *corporate governance*, intensitas modal dan diversifikasi gender terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari rencana penelitian, penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional dari masing-masing variabel.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, analisis data, dan interpretasi dari hasil penelitian. Pada bab ini juga memberikan penjelasan terkait tujuan penelitian dan pembahasan mengenai variabel *corporate governance*, intensitas modal dan diversifikasi gender terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang merupakan inti dari hasil penelitian ini serta jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun saran dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Dalam Jensen & Meckling (1976) teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Hubungan kontraktual tersebut terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa atas adanya pendelegasian wewenang yang diberikan dalam mengambil beberapa keputusan. Dalam hubungan tersebut pihak manajemen selaku *agent* akan melakukan apa yang diminta pemilik/pemimpin selaku *principal*. Salah satunya guna untuk mendapatkan keuntungan, *principal* meminta *agent* untuk melakukan manajemen pajak melalui *tax avoidance*. Tentunya apa yang diminta pihak *principal* dengan tujuan kesejahteraan dirinya maupun sang *agent*.

Akan tetapi, di dalam hubungan kontraktual telah terdapat dua kepentingan sekaligus pemisahan fungsi antara pemilik selaku *principal* dan manajemen selaku *agent* yang mengelola perusahaan. Sehingga hal ini dapat menimbulkan dua permasalahan keagenan (*agency problem*) yaitu terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Informasi asimetris merupakan kondisi dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, posisi keuangan yang

sebenarnya dan perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini bisa dikatakan *agent* mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan *principal*, sehingga menyebabkan adanya *moral hazard*. Sedangkan konflik kepentingan merupakan kondisi yang terjadi akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Permasalahan keagenan (*agency problem*) terjadi ketika pimpinan perusahaan selaku *principal* menginginkan untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak guna mendapatkan keuntungan dengan cara penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh pihak manajemen selaku *agent* dengan tanpa melihat apakah langkah yang dilakukan dalam efisiensi pembayaran pajak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ataupun tidak. Meskipun hal ini dapat membayar pajak secara efisien dan perusahaan mendapat keuntungan yang diharapkan, namun nantinya jika melanggar peraturan perundang-undangan pajak akan membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Hal ini dilakukan pihak manajemen yang hanya semata untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan diterima perusahaan ke depannya.

2.1.2 Teori Feminisme

Feminisme adalah paham atau keyakinan bahwa perempuan benar-benar bagian dari alam manusia, bukan dari yang lain yang menuntut kesetaraan dengan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan, tanpa melihat

kodrat dan fitrahnya. Kesetaraan ini biasanya disebut juga dengan istilah kesetaraan gender (*gender equality*). Dalam hal kesetaraan gender dapat diartikan bahwa dengan adanya kesamaan kondisi laki-laki maupun perempuan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai makhluk sosial atau manusia. Hal ini diharapkan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam semua kegiatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan serta kesamaan dalam menikmati pembangunan (Nuryati, 2015).

Eksekutif dalam perusahaan sangat mempengaruhi dalam pengambilan dalam berbagai keputusan, termasuk dalam bidang perpajakan. Perbandingan proporsi wanita dan pria dalam susunan eksekutif berpengaruh dalam keputusan yang diambil karena pada hakikatnya wanita dan pria memiliki sifat yang berbeda yang merupakan bawaan dan sudah melekat pada diri individu tersebut. Menurut Maccrimon dan Wehrung (1990) dan Low (2006) dalam Budiman dan Setiyono (2012), eksekutif dengan karakter risk-taking cenderung dimiliki pria lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis, sedangkan karakter risk-averse yang cenderung dimiliki oleh wanita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Menurut Kusumastuti, Supatmi, & Sastra (2007), di dalam *board gender diversity* masih ada anggapan bahwa pria yang lebih pantas menduduki jabatan penting dalam perusahaan. Kesuksesan pria dianggap karena kemampuan yang tinggi (dalam hal talenta atau kecerdasan),

sedangkan kesuksesan wanita dianggap lebih disebabkan oleh faktor keberuntungan.

Fallan (1999) menunjukkan bahwa perbedaan pada tingkat pengetahuan pajak dapat mempengaruhi sikap terhadap laki-laki dan perempuan. Menurut peneliti kepatuhan pajak, pria menunjukkan kecenderungan untuk kurang patuh dan memiliki moral pajak yang lebih rendah, yang didefinisikan dengan kesediaan untuk membayar pajak (Vogel, 1974; Croson dan Gneezy (2009) menunjukkan bahwa para wanita lebih cenderung menolak risiko, khususnya pada hal-hal tertentu dan mereka kurang terlibat dari laki-laki khususnya dalam perilaku non etik. Penelitian pada perilaku pajak menunjukkan bahwa perempuan tidak bekerja sama dalam strategi penghindaran pajak. (Kastlunger et al., 2010).

Menurut literatur tentang perbedaan perilaku pengambilan risiko antara kedua jenis kelamin dan kepatuhan pajak (Croson dan Gneezy, (2009); Hasseldine, (1999), Kastlunger et al.,(2010) anggaplah bahwa perempuan menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi sedangkan laki-laki menunjukkan sebaliknya yaitu tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Jika dikaitkan dengan teori feminisme, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Peningkatan prosentase wanita dalam eksekutif perusahaan memberikan dampak berbagai keputusan perusahaan termasuk dalam bidang perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian

Francis, Hasan, Wu, & Yan (2014) yang menyatakan bahwa pengaruh wanita dalam eksekutif meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam hal perpajakan.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah pajak (*tax loopholes*) untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak. Definisi lain *tax avoidance* menurut Dewi & Sari (2015) yaitu usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Santosa & Rahayu (2013) memaparkan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Pertama, menahan diri dengan tidak melakukan sesuatu yang dikenai pajak. Kedua, pindah lokasi dengan memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Ketiga, penghindaran pajak secara yuridis yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan ketidakjelasan undang-undang yang bisa menjadi *loopholes*. Penghindaran pajak cara ketiga ini yang biasa dilakukan oleh perusahaan, guna melakukan efisiensi pembayaran pajak.

Perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak biasanya menggunakan skema tertentu. Skema penghindaran pajak yang sering

dilakukan perusahaan asing/ multinasional di Indonesia tersebut antara lain (Rahayu, 2011):

a) *Transfer Pricing*

Definisi *transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Rahayu, 2011).

Dalam konteks perpajakan *transfer pricing* dapat digunakan untuk mereayasa pembebanan harga suatu transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa/ *related parties* dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan. Sehingga, untuk mencegah penghindaran pajak karena penentuan harga tidak wajar (*non arm's length price*), muncul Peraturan Dirjen Pajak No.PER-43/PJ/2010. Aturan ini membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principles*) terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak istimewa (Rahayu, 2011).

b) Thin Capitalization

Thin capitalization adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan dengan modal terselubung melalui pinjaman yang melampaui batas kewajaran. Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* ini adalah pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam. Dari sudut pandang perpajakan pendanaan ini merupakan utang yang mendatangkan *tax advantage* atas bunga sebagai pengurang penghasilan. Sehingga untuk menentukan perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/ PMK.010/ 2015.

c) Treaty Shopping

Praktik *treaty shopping* dilakukan untuk dapat memanfaatkan *treaty benefit*. Dalam hal ini fasilitas-fasilitas yang tercantum dalam *tax treaty* (*treaty benefit*) hanya boleh dinikmati oleh residen (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara yang mengikat perjanjian (Rahayu, 2011).

d) Controlled Foreign Corporation (CFC)

Definisi *Controlled Foreign Company* (CFC) menurut Wahyudi (2010) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak

rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax haven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (*tax avoidance*). Skema CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak dalam negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Rahayu (2010) menambahkan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar atas investasi yang dilakukan di luar negeri adalah dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya.

Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tidak dibagikan/ ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*. Sehingga hal ini telah diatur dalam PMK Nomor 256/ PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek.

Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Akan tetapi ketika *tax avoidance* memiliki tujuan usaha yang baik, yaitu untuk menghemat atau menghindari pajak tetapi dalam koridor ketentuan perpajakan bukanlah hal yang melanggar (*illegal*). Karena dalam hal ini penerapannya dengan meminimalkan beban pajak yang dilakukan melalui

beberapa strategi perpajakan. Cara untuk mendeteksi adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satunya dengan menggunakan *cash effective tax rate (cash ETR)*.

2.1.4 Corporate Governance

Corporate Governance menurut Sutedi (2011) adalah “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Wibowo (2010) mengemukakan terdapat lima prinsip mendasari dan menjadi aspek penting dalam *corporate governance*, antara lain:

1. Transparency (transparansi)

Prinsip dasar transparansi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan serta harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Accountability (akuntabilitas)

Prinsip dasar akuntabilitas merupakan adanya suatu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Dengan kata

lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Responsibility (pertanggungjawaban)

Prinsip dasar *responsibility* adalah suatu prinsip dimana suatu perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka waktu yang panjang.

4. Independensi

Prinsip dasar independensi merupakan suatu prinsip yang digunakan untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip dasar dalam kesetaraan dan kewajaran adalah suatu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.

Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini yang meliputi, proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial

a. Proporsi komisaris independen

Karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan adalah komisaris independen yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif. Keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan akan dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, termasuk keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita & Harto, 2014). Komisaris independen dalam perusahaan dapat memberikan arahan kepada manajer perusahaan untuk mengelola perusahaan

dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan perusahaan agar lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan mengenai pembayaran pajak yang akan dilakukan perusahaan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017)

b. Kualitas audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari good corporate governance. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik. Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya (Damayanti & Susanti, 2015).

c. Komite audit

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit

eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau Shareholders dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Damayanti & Susanti, 2015).

d. Kepemilikan Institusional

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun sebaliknya terhadap manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para

manajer secara efektif. Tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

2.1.5 Intensitas Modal

Intensitas modal atau insensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya. Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya (Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias, 2012). Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

2.1.6 Diversifikasi Gender

Menurut Kusumastuti, Supatmi, & Sastra (2007), di dalam *board gender diversity* masih ada anggapan bahwa pria yang lebih pantas menduduki jabatan penting dalam perusahaan. Kesuksesan pria dianggap

karena kemampuan yang tinggi (dalam hal talenta atau kecerdasan), sedangkan kesuksesan wanita dianggap lebih disebabkan oleh faktor keberuntungan. Hal ini menyebabkan proporsi wanita dalam jabatan yang penting masih sedikit, karena dianggap kemampuan pria lebih tinggi daripada wanita. Namun di sisi lain, wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria dalam mengambil keputusan termasuk yang berkaitan dengan perpajakan (Kusumastuti et al., 2007).

Persebaran anggota dewan (*board diversity*) adalah isu terkini yang berkaitan dengan mekanisme *corporate governance*. *Board diversity* akan berpengaruh terhadap komposisi anggota dewan direksi perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi implementasi *corporate governance*. Proposisi dan bukti empiris mengenai kelebihan dari *board diversity*, diantaranya adalah: Pertama, *board diversity* memiliki pemahaman yang lebih baik tentang *marketplace*, dikarenakan kondisi demografi *supplier* dan pelanggan perusahaan yang juga beragam. Kedua *board diversity* dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ketiga, *board diversity* dapat menghasilkan alternatif pemecahan masalah yang lebih efektif. Heterogenitas dalam dewan di satu sisi berpotensi menimbulkan banyak konflik, namun di sisi lain pandangan mengenai alternatif pemecahan terhadap suatu masalah akan semakin banyak dan dapat menimbulkan kecermatan dalam mengkaji konsekuensi yang mungkin dihadapi dari alternatif yang diambil. Keempat, *board diversity* dapat meningkatkan

efektivitas kepemimpinan perusahaan. Karena sudut pandang dalam anggota yang homogen menyebabkan perspektif terhadap sesuatu hal akan menjadi lebih sempit jika dibandingkan dengan anggota dewan yang beragam. Terakhir, *board diversity* terbukti mampu lebih efektif dalam meningkatkan hubungan dengan dunia global (Amri, 2017).

Teori feminisme adalah teori yang menyatakan bahwa golongan wanita sama derajatnya dengan golongan pria sehingga harus adanya kesetaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi wanita dan pria di segala bidang, termasuk dalam jabatan / posisi di dalam lingkup perusahaan. Teori feminisme tergolong dalam teori akuntansi kritis yang menyoroti tentang perilaku diversitas gender dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan dan laporan keuangan. Teori ini memperkuat teori atribusi, yang dapat menjelaskan bahwa wanita juga bisa sejajar posisinya dengan pria dalam mengambil keputusan, dan berhak atas posisi yang sama dengan pria sebagai eksekutif (Winasis et al., 2017).

2.1.7 Profitabilitas

Profitabilitas adalah salah satu ukuran kinerja dalam menggambarkan kemampuan menghasilkan laba selama periode tertentu dalam suatu perusahaan (Utari & Supadmi, 2017). Suatu perusahaan dengan profitabilitas yang baik, terlihat mempunyai nilai *effectivedtax rates* yang lebih tinggi. Profitabilitas diproksikan menggunakan proksi Return On Assets (ROA). ROA mampu mencerminkan kemampuan beroperasi perusahaan dalam mendapatkan laba. Perusahaan yang mampu mengelola pendapatan dan pembayaran pajaknya dianggap memperoleh

laba sehingga diasumsikan tidak melakukan tax avoidance (Utari & Supadmi, 2017).

Laba dijadikan indikator bagi para stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisis laporan keuangan melalui rasio profitabilitas

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Wibawa et al. (2016) meneliti mengenai pengaruh persentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian diketahui secara simultan variabel persentase dewan komisaris independen, komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial didapatkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Utari & Supadmi (2017) meneliti mengenai pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan koneksi politik pada tax avoidance. Seluruh perusahaan industri properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2012–2015 merupakan populasi yang diambil. Metode pemilihan sampel didapatkan melalui teknik purposive sampling sehingga diperoleh 128

observasian. Analisis linear berganda digunakan untuk menganalisa data penelitian. Berdasarkan hasil analisis, proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit merupakan proksi dari corporate governance berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada tax avoidance. Profitabilitas diukur menggunakan return on assets berpengaruh negatif dan signifikan pada tax avoidance, serta koneksi politik yang diukur dengan variabel dummy berpengaruh positif dan signifikan pada tax avoidance.

Penelitian Dharma & Ardiana (2016) mengenai pengaruh leverage, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan effective tax rate (ETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Jumlah pengamatan sebanyak 144 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode nonprobability sampling yaitu teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage dan intensitas aset tetap akan menyebabkan menurunnya tingkat tax avoidance. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka tindakan tax avoidance akan tinggi. Sementara koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance.

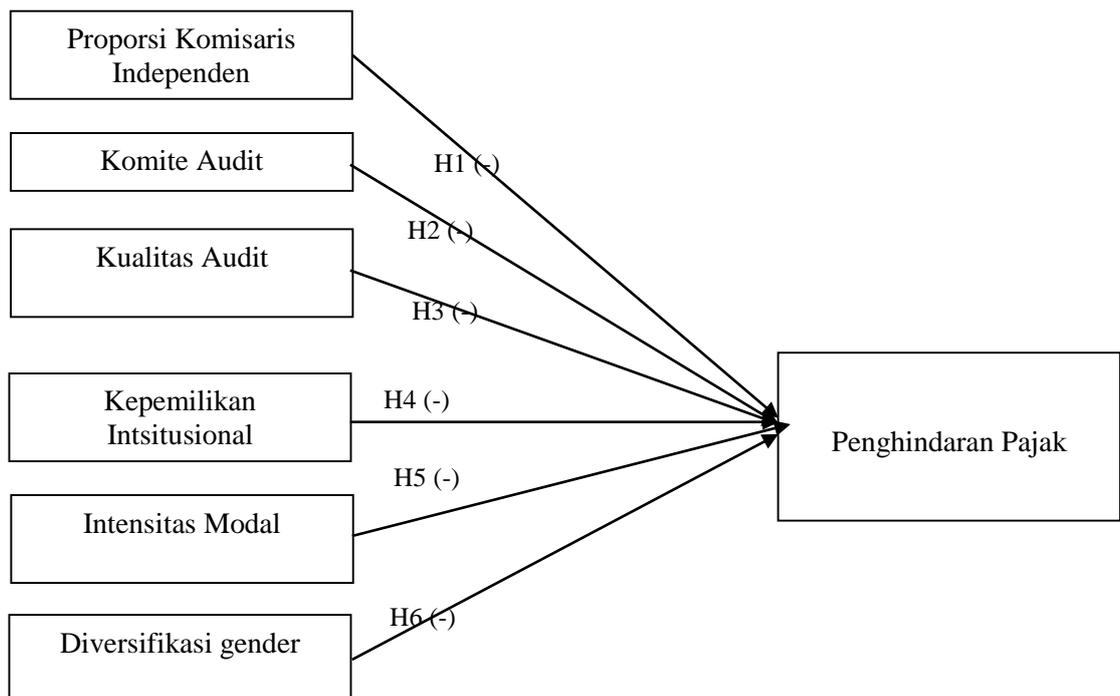
Penelitian Mulyani et al. (2014) meneliti mengenai pengaruh karakteristik perusahaan yang terdiri dari leverage dan intensitas modal, koneksi politik dan reformasi pajak terhadap penghindaran pajak secara simultan dan parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan. Metode sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur dan listing di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 hingga 2012. Analisis regresi berganda dilakukan menggunakan SPSS versi 21.00 for windows. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel leverage, intensitas modal, koneksi politik dan reformasi pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap penghindaran pajak. Dari hasil analisis secara parsial diketahui bahwa variabel leverage dan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan intensitas modal dan reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Penelitian Ridwan et al. (2015) meneliti mengenai Pengaruh Dewan Komisaris Keragaman Gender, Independen Dewan Komisaris, dan Ukuran Dewan Komisaris pada Perencanaan Pajak. Hipotesis yang ditentukan berdasarkan teori agensi lebih lanjut sampel penelitian. Sampel penelitian ini dari beberapa perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2011 hingga 2013 dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dewan komisaris terhadap keberagaman gender, dan komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Sementara ukuran variabel dewan

komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak. Penelitian juga diketahui bahwa semua variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.
Kerangka Konseptual Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, kontrak yang efisien dapat terjadi apabila tidak terdapat informasi yang tersembunyi diantara pihak prinsipal dan agen. Apabila agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibanding prinsipal, maka pihak prinsipal dapat melakukan pengawasan dengan kehadiran komisaris independen dalam perusahaan untuk memonitor perilaku agen saat menjalankan tugasnya. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen sehingga dapat meminimalisir perilaku disfungsional yang dapat terjadi seperti penghindaran pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Komisaris independen dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Peningkatan keberadaan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi serta memperketat pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan tersebut dapat membuat manajemen lebih berhati-hati dalam membuat sebuah keputusan dalam menjalankan perusahaan sehingga aktivitas pengurangan jumlah

pembayaran pajak yang dilakukan dengan penghindaran pajak dalam diminimalkan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Hasil penelitian Wibawa et al. (2016) dan Wijayanti & Merkusiwati (2017) membuktikan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah :

H1 : proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Noviawan & Septiani (2013) mengemukakan permasalahan keagenan yang dapat muncul dalam hubungan antara *agent* dengan *principal* adalah *moral hazard*, dimana manajer atau *agent* tidak melaksanakan tugas sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja. Salah satunya adalah kemungkinan kecurangan dalam menyusun laporan keuangan. Komite audit memiliki peran penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan seperti halnya menjaga berjalannya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta penerapan *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka fungsi pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik dan dapat mencegah konflik keagenan, juga dapat menurunkan penghindaran pajak perusahaan.

Komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan yang diambil

perusahaan, sehingga membantu mengontrol manajer agar berlaku sesuai kepentingan pemegang saham. Untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan keahlian dalam hal akuntansi, perpajakan, dan peraturan hukum. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemegang saham (S. R. Puspita & Harto, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawa et al. (2016) dan Maraya & Yendrawati (2016) membuktikan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah :

H2 : komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Dalam teori keagenan, salah satu elemen penting dalam GCG adalah transparansi. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Maraya & Yendrawati, 2016).

Menurut penelitian Sari, Kalbuana, & Jumadi, (2015) kaitannya dengan pajak perusahaan, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas informasi dalam kaitannya dengan perpajakan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan agar terjamin reliabilitas informasi. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dari KAP yang berafiliasi dengan Big Four lebih berkualitas tinggi dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh auditor afiliasi non Big Four.

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP Big Four memiliki tingkat kecurangan dalam aktivitas perpajakan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four. Apabila kualitas audit baik, maka penghindaran pajak semakin kecil karena laporan keuangan yang memiliki kualitas audit yang baik akan bebas dari kecurangan. Kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam KAP Big Four lebih kompeten dan profesional, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Maraya & Yendrawati, 2016).

Hasil penelitian Maraya & Yendrawati (2016) membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah :
H3 : kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah mekanisme GCG yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka kepatuhan dan kinerja manajemen akan meningkat. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Investor institusional memiliki andil didalam keputusan maka secara otomatis akan mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah sehingga perusahaan patuh terhadap pajak (Maraya & Yendrawati, 2016).

Hasil penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) dan Maraya & Yendrawati (2016) membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh

negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah :

H4 : kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.5 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Dalam hubungan teori keagenan, rasio intensitas modal ini penting bagi kreditor dan pemilik perusahaan, tetapi akan lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan karena hal ini menunjukkan efisien tidaknya penggunaan seluruh aktiva di dalam perusahaan. Intensitas modal atau intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya (Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias, 2012).

Menurut Mulyani et al. (2014) pemilihan investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible* menyebabkan laba kena pajak

perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Dharma & Ardiana, 2016) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rates* (ETR). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Maka semakin tinggi intensitas aset tetap perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis klima penelitian ini adalah :

H5 : intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.6 Pengaruh Diversifikasi Gender Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Jika dikaitkan dengan teori feminisme, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Peningkatan prosentase wanita dalam eksekutif perusahaan memberikan dampak berbagai keputusan perusahaan termasuk dalam bidang perpajakan. Perusahaan berfokus pada pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja para manajemen untuk dapat berperilaku secara jujur dan mengutamakan tata kelola yang baik. Tidak sedikit perusahaan mengalami masalah yang menimbulkan polemik terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Diversitas perusahaan khususnya gender diperlukan untuk membatasi masalah tersebut. Dengan

adanya perempuan sebagai dewan direksi diharapkan mampu memberikan pandangan secara luas dan cenderung menghindari resiko dalam pengambilan keputusan.

Khaoula & Mohamed Ali (2012) berpendapat terkadang perusahaan melewatkan berbagai bakat dan pengalaman perempuan ketika mewakili perusahaan. Hal ini mengakibatkan posisi perempuan pada dewan puncak menjadi minoritas, selama dekade terbaru telah ada minat yang meningkat pada *gender* eksekutif puncak dan direksi di perusahaan. Persentase perempuan dalam posisi manajemen puncak masih sangat rendah di kebanyakan negara. Peningkatan prosentase wanita dalam eksekutif perusahaan memberikan dampak berbagai keputusan perusahaan termasuk dalam bidang perpajakan (Winasis et al., 2017).

Hasil penelitian Khaoula & Mohamed Ali (2012), Khumairoh et al. (2017) dan Winasis et al. (2017) membuktikan diversifikasi gender berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keenam penelitian ini adalah :

H6 : diversifikasi gender berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* artinya bahwa penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan memperoleh sampel yang representatif.

Kriteria tertentu yang ditetapkan dalam pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016.
2. Perusahaan pertambangan yang tidak *delisting* selama periode penelitian tersebut.
3. Perusahaan pertambangan yang laba bersih sebelum pajaknya positif atau tidak mengalami kerugian selama periode 2014-2016.
4. Perusahaan pertambangan yang menyampaikan data secara lengkap selama periode 2014-2016 berhubungan dengan variabel penelitian.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan

perusahaan (*annual report*). Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari website resmi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate governance*, intensitas modal, diversifikasi gender, koneksi politik sedangkan variabel kontrol adalah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan.

3.3.1 Variabel Dependen

1. Penghindaran Pajak

Definisi *tax avoidance* menurut Dewi & Sari (2015) yaitu usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam penelitian ini *tax avoidance* sebagai variabel dependen diukur melalui ETR (*effective tax rate*) perusahaan yaitu perbandingan beban pajak dengan pendapatan sebelum pajak. Rumus untuk menghitung ETR yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Variabel Independen

1. *Corporate Governance*

Corporate Governance menurut Sutedi (2011) adalah “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini yang meliputi, proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional

a. Proporsi komisaris independen

Karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan adalah komisaris independen yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif. (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Pengukuran variabel ini menggunakan rumus sebagai berikut (Wijayanti & Merkusiwati, 2017):

$$PDKI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Dewan Komisaris}}$$

b. Komite audit

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang (Damayanti & Susanti, 2015). Pengukuran variabel ini menggunakan rumus sebagai berikut (Damayanti & Susanti, 2015):

$$KA = \text{Total Anggota Komite Audit}$$

a. Kualitas audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. (Damayanti & Susanti, 2015). Kualitas audit diukur dengan ukuran KAP pada perusahaan i Kualitas tahun t. Variabel ini adalah variabel dummy, jika perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 (Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernest and Young) maka bernilai 1, tetapi jika perusahaan diaudit oleh KAP non big 4 maka bernilai 0.

b. Kepemilikan Institusional

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri,

dan dana perwalian serta institusi lainnya. Pengukuran variabel ini menggunakan rumus sebagai berikut (Wijayanti & Merkusiwati, 2017):

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Jumlah Saham Beredar}}$$

2. Intensitas Modal

Intensitas modal atau insensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan (Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias, 2012). Pengukuran variabel ini menggunakan rumus sebagai berikut (Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias, 2012):

$$\text{IM} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3. Diversifikasi Gender

Menurut Kusumastuti, Supatmi, & Sastra (2007), di dalam *board gender diversity* masih ada anggapan bahwa pria yang lebih pantas menduduki jabatan penting dalam perusahaan. Diversifikasi gender diukur dengan variabel dummy, jika perusahaan mempunyai anggota dewan komisaris dan direksi wanita maka bernilai 1, tetapi jika

perusahaan tidak mempunyai anggota dewan komisaris dan direksi wanita maka bernilai 0.

3.3.3 Variabel Kontrol

1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah salah satu ukuran kinerja dalam menggambarkan kemampuan menghasilkan laba selama periode tertentu dalam suatu perusahaan (Utari & Supadmi, 2017). Suatu perusahaan dengan profitabilitas yang baik, terlihat mempunyai nilai *effectivedtax rates* yang lebih tinggi. Profitabilitas diprosikan menggunakan proksi Return On Assets (ROA). Pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut (Utari & Supadmi, 2017).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

3.4 Metode Analisa Data

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisasi dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati & Porter (2013) agar model regresi tidak bias atau agar model regresi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

3.1.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikatnya mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji statistik (Ghozali, 2013). Uji statistik dilakukan dengan menggunakan uji *kolomogorov-smirnov* dengan melihat tingkat signifikansinya. Pendeteksian normalitas data apakah terdistribusi normal apabila nilai signifikansi *kolomogorof-smirnov* $> 0,05$.

3.1.1.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013). Untuk mengetahui dalam model regresi terdapat multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF). Apabila nilai $VIF \geq 10$ dan nilai *tolerance* $\leq 0,1$ mengindikasikan bahwa model regresi mengalami multikolinieritas. Begitu sebaliknya, apabila model regresi mempunyai nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *tolerance* $\geq 0,1$ maka model regresi terbebas dari multikolinieritas.

3.1.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (Ghozali, 2013). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas.

3.4.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dikarenakan ingin mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi (R^2), uji individual (uji T), dan uji simultan (uji F). Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1PDKI + \beta_2KA + \beta_3KAP + \beta_4INST + \beta_5IM + \beta_6DG + \beta_7ROA + \varepsilon$$

Keterangan :

ETR = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

PDKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen

KA = Komite Audit

KAP = Kualitas Audit

INST	= Kepemilikan Institusional
IM	= Intensitas Modal
DG	= Diversifikasi Gender
ROA	= Profitabilitas
β	= Koefisien Regresi
ϵ	= Error/Tingkat Kesalahan

Dengan persamaan diatas, hipotesis alternatif akan didukung dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila hasil analisis memiliki tingkat sig lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi sesuai dengan yang diprediksi maka hipotesis alternatif diterima.

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila hasil R^2 mendekati 1 (satu), maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun, apabila hasil R^2 mendekati 0 (nol), maka terdapat korelasi yang lemah antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2013).

Pengujian uji F bertujuan untuk menguji kelayakan model penelitian. Apabila hasil analisis memiliki tingkat sig lebih kecil dari 0,05 maka model telah layak sedangkan sig lebih besar dari 0,05 maka model tidak layak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ($\alpha = 5\%$).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI yang tercatat dari tahun 2014-2016. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2014-2016. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara acak dan menggunakan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Penarikan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
Populasi	Perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016	42
1	Perusahaan pertambangan yang <i>delisting</i> selama periode penelitian tersebut.	(10)
2	Perusahaan pertambangan yang laba bersih sebelum pajaknya negatif selama periode 2014-2016.	(17)
3	Perusahaan pertambangan yang tidak menyampaikan data secara lengkap selama periode 2014-2016 berhubungan dengan variabel penelitian.	0
	Jumlah Perusahaan Sampel	15

Sumber : Data Diolah, 2018

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilihat menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Hasil dari deskriptif statistik dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2

Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	45	,01	,63	,3345	,15090
PDKI	45	,25	,75	,3997	,12402
KA	45	2,00	5,00	3,0889	,46818
KAP	45	1,00	1,00	,6444	,48409
INST	45	,26	,97	,6151	,19132
IM	45	,03	,70	,3048	,15750
GD	45	,00	1,00	,3778	,49031
ROA	45	,00	,15	,0627	,04679
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Data Diolah, 2018

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai minimum tarif pajak efektif (ETR) adalah sebesar 0,01 yang diperoleh PT Bukit Asam Tbk yang berarti bahwa PT Bukit Asam Tbk merupakan perusahaan dengan beban pajak yang paling rendah diantara perusahaan sampel sedangkan nilai maksimum tarif pajak efektif (ETR) adalah sebesar 0,63 yang diperoleh perusahaan seperti PT Vale Indonesia Tbk yang berarti bahwa PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan dengan beban pajak tertinggi diantara perusahaan sampel. Nilai rata-rata beban pajak yang ditanggung oleh rata-rata perusahaan tahun 2014-2016 adalah sebesar 0,3345 dengan standar

deviasi sebesar 0,15090. Nilai rata-rata penghindaran pajak tersebut lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data tarif pajak efektif bersifat homogen.

2. Nilai minimum proporsi komisaris independen adalah sebesar 0,25 atau 25% yang diperoleh PT Surya Essa Perkasa Tbk yang berarti bahwa PT Surya Essa Perkasa Tbk merupakan perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang paling rendah diantara perusahaan sampel sedangkan nilai maksimum proporsi komisaris independen adalah sebesar 0,75 atau 75% yang diperoleh perusahaan seperti PT Golden Energy Mines Tbk yang berarti bahwa PT Golden Energy Mines Tbk merupakan perusahaan dengan proporsi komisaris independen tertinggi diantara perusahaan sampel. Nilai rata-rata proporsi komisaris independen tahun 2014-2016 adalah sebesar 0,3997 dengan standar deviasi sebesar 0,12402. Nilai rata-rata sebesar 0,3997 dapat diartikan bahwa tingkat proporsi komisaris independen adalah sebesar 39,97%. Nilai rata-rata proporsi komisaris independen tersebut lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data proporsi komisaris independen bersifat homogen.
3. Nilai minimum komite audit adalah sebesar 2 yang diperoleh PT Baramulti Sukses Sarana Tbk yang berarti bahwa PT Baramulti Sukses Sarana Tbk merupakan perusahaan dengan komite audit yang paling rendah diantara perusahaan sampel sedangkan nilai maksimum komite audit adalah sebesar 5 yang diperoleh perusahaan seperti PT Timah Tbk yang berarti bahwa PT

4. perusahaan sampel. Nilai rata-rata komite audit tahun 2014-2016 adalah sebesar 3,0889 dengan standar deviasi sebesar 0,4818. Nilai rata-rata sebesar 3,0889 dapat diartikan bahwa tingkat komite audit adalah sebesar 3,0889. Nilai rata-rata komite audit tersebut lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data komite audit bersifat homogen.
5. Nilai minimum kualitas audit adalah sebesar 1 yang berarti bahwa perusahaan tersebut menggunakan KAP non big four sedangkan nilai maksimum kualitas audit adalah sebesar 1 yang berarti bahwa perusahaan tersebut menggunakan KAP Big Four. Nilai rata-rata kualitas audit tahun 2014-2016 adalah sebesar 0,6444 dengan standar deviasi sebesar 0,48409. Nilai rata-rata sebesar 0,6444 dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan yang menggunakan KAP big four adalah sebesar 64,44%. Nilai rata-rata kualitas audit tersebut lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data kualitas audit bersifat homogen.
6. Nilai minimum kepemilikan institusional adalah sebesar 0,26 yang diperoleh PT Baramulti Sukses Sarana Tbk yang berarti bahwa PT Baramulti Sukses Sarana Tbk merupakan perusahaan dengan kepemilikan institusional yang paling rendah diantara perusahaan sampel sedangkan nilai maksimum kepemilikan institusional adalah sebesar 0,97 yang diperoleh perusahaan seperti PT Golden Energy Mines Tbk yang berarti bahwa PT Golden Energy Mines Tbk merupakan perusahaan dengan kepemilikan institusi tertinggi diantara perusahaan sampel. Nilai rata-rata kepemilikan institusi tahun 2014-2016 adalah sebesar 0,6151 dengan standar deviasi sebesar 0,19132. Nilai rata-

rata sebesar 0,6151 dapat diartikan bahwa prosentase jumlah saham yang dimiliki institusi adalah sebesar 61,51%. Nilai rata-rata kepemilikan institusi tersebut lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data kepemilikan institusi bersifat homogen.

7. Nilai minimum intensitas modal adalah sebesar 0,03 yang diperoleh PT Baramulti Sukses Sarana Tbk yang berarti bahwa PT Baramulti Sukses Sarana Tbk merupakan perusahaan dengan intensitas modal yang paling rendah diantara perusahaan sampel sedangkan nilai maksimum intensitas modal adalah sebesar 0,70 atau 70% yang diperoleh perusahaan seperti PT Vale Indonesia Tbk yang berarti bahwa PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan dengan intensitas modal tertinggi diantara perusahaan sampel. Nilai rata-rata intensitas modal tahun 2014-2016 adalah sebesar 0,3048 dengan standar deviasi sebesar 0,15750. Nilai rata-rata sebesar 0,3048 dapat diartikan bahwa tingkat intensitas modal adalah sebesar 30,48%. Nilai rata-rata 0,15750 tersebut lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data intensitas modal bersifat homogen.

8. Nilai minimum gender adalah sebesar 0 yang berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai dewan berjenis kelamin laki-laki sedangkan nilai maksimum gender adalah sebesar 1 yang berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai dewan berjenis kelamin perempuan. Nilai rata-rata gender tahun 2014-2016 adalah sebesar 0,3778 dengan standar deviasi sebesar 0,49031. Nilai rata-rata sebesar 0,3778 dapat diartikan bahwa jumlah perusahaan yang mempunyai dewan berjenis kelamin wanita adalah sebesar 37,78%. Nilai rata-

rata gener tersebut lebih kecil dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data gender bersifat heterogen.

9. Nilai minimum profitabilitas adalah sebesar 0,00 atau 13,60% yang diperoleh PT Vale Indonesia Tbk yang berarti bahwa PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan dengan profitabilitas yang paling rendah diantara perusahaan sampel sedangkan nilai maksimum profitabilitas adalah sebesar 0,15 atau 15% yang diperoleh perusahaan seperti PT Myoh Energy Tbk yang berarti bahwa PT Myoh Energy Tbk merupakan perusahaan dengan profitabilitas tertinggi diantara perusahaan sampel. Nilai rata-rata profitabilitas tahun 2014-2016 adalah sebesar 0,0627 dengan standar deviasi sebesar 0,04679. Nilai rata-rata sebesar 0,0627 dapat diartikan bahwa kemampuan mendapatkan laba perusahaan adalah sebesar 6,27%. Nilai rata-rata 0,0627 tersebut lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa data profitabilitas bersifat homogen.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov, dengan melihat tingkat signifikansi 5%. Hasil uji normalitas untuk seluruh model penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08923142
	Absolute	,117
Most Extreme Differences	Positive	,046
	Negative	-,117
Kolmogorov-Smirnov Z		,786
Asymp. Sig. (2-tailed)		,567

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah, 2018

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,567. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai uji VIF dan tolerance. Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PDKI	,655	1,526
KA	,866	1,155
KAP	,696	1,437
INST	,751	1,331
IM	,790	1,267
GD	,736	1,358
ROA	,855	1,170

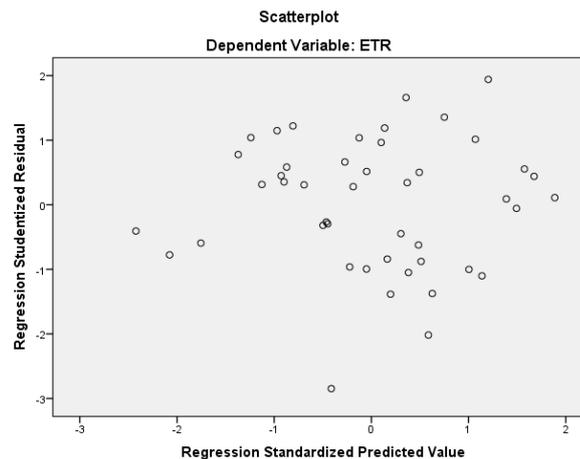
Sumber : Data diolah, 2018

Dari hasil analisis uji multikolinieritas di atas, dihasilkan nilai koefisien tolerance diatas 0,1 dan VIF di bawah 10. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji scatter plot. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Diolah, 2018

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, pada hasil uji scatter plot data acak dan tidak membentuk pola. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,806 ^a	,650	,584	,09731	1,973

a. Predictors: (Constant), ROA, IM, INST, KA, GD, KAP, PDKI

b. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data Diolah, 2018

Dari hasil analisis uji autokorelasi di atas, pada hasil uji *durbin watson* sebesar 1,973. Nilai ini akan dibandingkan dengan DW tabel dengan jumlah sampel 45 jumlah variabel bebas 7 dan tingkat kepercayaan 5% di dapat nilai batas bawah (dl) = 1,1391 dan batas atas (du) = 1,9578. Oleh karena nilai DW 1,973 berada di antara batas atas (du) = 1,9578 dan $(4-du) = 2,0433$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dikarenakan ingin mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,684	,130		5,245	,000
PDKI	-,383	,146	-,315	-2,621	,013
KA	,005	,034	,014	,139	,890
KAP	-,144	,036	-,463	-3,975	,000
INST	,064	,088	,081	,718	,477
IM	-,221	,105	-,231	-2,111	,042
GD	-,086	,035	-,280	-2,468	,018
ROA	-,915	,339	-,284	-2,697	,010

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data Diolah, 2018

Hasil persamaan analisis *regresi* berganda adalah sebagai berikut :

$$ETR = 0,684 - 0,383PDKI + 0,005KA - 0,144KAP + 0,064INST - 0,221IM - 0,086DG - 0,915ROA + \varepsilon$$

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Nilai *intercept* konstanta sebesar 0,684. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya penghindaran pajak akan sebesar 0,684.

2. Nilai koefisien regresi dewan komisaris independen sebesar $-0,383$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai variabel proporsi DKI satu satuan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar $0,383$ dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi komite audit sebesar $0,005$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai variabel komite audit meningkat satu satuan maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar $0,005$ dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
4. Nilai koefisien regresi kualitas audit sebesar $-0,144$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai variabel kualitas audit menggunakan KAP Big Four maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar $0,144$ dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
5. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar $0,064$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai variabel kepemilikan institusional meningkat satu satuan maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar $0,064$ dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
6. Nilai koefisien regresi intensitas modal sebesar $-0,221$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai variabel intensitas modal naik satu satuan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar $0,221$ dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
7. Nilai koefisien regresi diversifikasi gender sebesar $-0,086$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai variabel diversifikasi gender naik satu satuan maka

penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,086 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

8. Nilai koefisien regresi profitabilitas sebesar -0,915. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai variabel profitabilitas naik satu satuan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,915 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila hasil R^2 mendekati 1 (satu), maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun, apabila hasil R^2 mendekati 0 (nol), maka terdapat korelasi yang lemah antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,806 ^a	,650	,584	,09731	1,973

a. Predictors: (Constant), ROA, IM, INST, KA, GD, KAP, PDKI

b. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data Diolah, 2018

Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel. 4.8 Hasil perhitungan koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,584. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel *independent* dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 58,4% dan sisanya sebesar 41,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.4.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ($\alpha = 5\%$). Hasil uji F adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,652	7	,093	9,831	,000 ^b
Residual	,350	37	,009		
Total	1,002	44			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), ROA, IM, INST, KA, GD, KAP, PDKI

Sumber : Data Diolah, 2018

Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel. 4.9 Hasil uji F menghasilkan Fhitung sebesar 9,831 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa model penelitian dapat diterima karena nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (tingkat signifikansi).

4.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,684	,130		5,245	,000
PDKI	-,383	,146	-,315	-2,621	,013
KA	,005	,034	,014	,139	,890
KAP	-,144	,036	-,463	-3,975	,000
INST	,064	,088	,081	,718	,477
IM	-,221	,105	-,231	-2,111	,042
GD	-,086	,035	-,280	-2,468	,018
ROA	-,915	,339	-,284	-2,697	,010

Sumber : Data Diolah 2018

Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari tabel 4.6 parameter hubungan proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak adalah

sebesar -0,383 dan nilai signifikansi sebesar 0.013. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $\rho = 0,013 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, proporsi komisaris independen perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sehingga hipotesis pertama penelitian ini dapat didukung.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari tabel 4.6 parameter hubungan komite audit terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 0,005 dan nilai signifikansi sebesar 0,890. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena $\rho = 0,890 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sehingga hipotesis kedua penelitian ini tidak dapat didukung

3. Pengujian Hipotesis ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari tabel 4.6 parameter hubungan kualitas audit terhadap penghindaran pajak adalah sebesar -0,144 dan nilai signifikansi sebesar 0.00. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $\rho = 0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kualitas audit perusahaan berpengaruh

positif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sehingga hipotesis ketiga penelitian ini dapat didukung.

4. Pengujian Hipotesis keempat

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari tabel 4.6 parameter hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 0,064 dan nilai signifikansi sebesar 0.477. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena $\rho = 0,477 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sehingga hipotesis keempat penelitian ini tidak dapat didukung.

5. Pengujian Hipotesis kelima

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari tabel 4.6 parameter hubungan intensitas modal terhadap penghindaran pajak adalah sebesar -0,221 dan nilai signifikansi sebesar 0.042. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $\rho = 0,042 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan sehingga hipotesis kelima penelitian ini tidak dapat didukung.

6. Pengujian Hipotesis keenam

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah diversifikasi gender berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari tabel 4.6 parameter hubungan diversifikasi gender terhadap penghindaran pajak adalah sebesar -0,086 dan nilai signifikansi sebesar 0.018. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $p = 0,018 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, diversifikasi gender berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sehingga hipotesis keenam penelitian ini dapat didukung.

4.5. Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi proporsi komisaris independen akan mengurangi penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, kontrak yang efisien dapat terjadi apabila tidak terdapat informasi yang tersembunyi diantara pihak prinsipal dan agen. Apabila agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibanding prinsipal, maka pihak prinsipal dapat melakukan pengawasan dengan kehadiran komisaris independen dalam perusahaan untuk memonitor perilaku agen saat menjalankan tugasnya. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen sehingga dapat meminimalisir perilaku disfungsi yang dapat terjadi seperti penghindaran pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Komisaris independen dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Peningkatan keberadaan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi serta memperketat pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan tersebut dapat membuat manajemen lebih berhati-hati dalam membuat sebuah keputusan dalam menjalankan perusahaan sehingga aktivitas pengurangan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan dengan penghindaran pajak dalam diminimalkan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Hasil ini sesuai penelitian Wibawa et al. (2016) dan Wijayanti & Merkusiwati (2017) membuktikan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4.5.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti komite audit proporsi komisaris independen tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi manajemen perusahaan terhadap kebijakan beban pajak yang terkait dengan aktifitas penghindaran pajak. Jumlah anggota komite audit pada perusahaan manufaktur tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa peran komite audit tidak

efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia. Meskipun semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan, tidak akan menghalangi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena komite audit tidak efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia. Hal ini juga disebabkan oleh keputusan mengenai kebijakan pajak dilakukan oleh pemilik perusahaan atau manajemen tingkat atas dalam perusahaan, bukan oleh komite audit (Ristadelvina & Puspaningsih, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ristadelvina & Puspaningsih (2017) membuktikan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4.5.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti kualitas audit Big Four akan mengurangi penghindaran pajak perusahaan.

Dalam teori keagenan, salah satu elemen penting dalam GCG adalah transparansi. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Maraya & Yendrawati, 2016).

Menurut penelitian Sari, Kalbuana, & Jumadi, (2015) kaitannya dengan pajak perusahaan, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, untuk

menjamin kualitas informasi dalam kaitannya dengan perpajakan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan agar terjamin reliabilitas informasi. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dari KAP yang berafiliasi dengan Big Four lebih berkualitas tinggi dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh auditor afiliasi non Big Four.

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP Big Four memiliki tingkat kecurangan dalam aktivitas perpajakan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four. Apabila kualitas audit baik, maka penghindaran pajak semakin kecil karena laporan keuangan yang memiliki kualitas audit yang baik akan bebas dari kecurangan. Kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam KAP Big Four lebih kompeten dan profesional, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Maraya & Yendrawati, 2016).

Hasil ini sesuai penelitian Maraya & Yendrawati (2016) membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4.5.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Hasil penelitian ini membuktikan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini memiliki arti bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank kecuali kepemilikan individual. Kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peran penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan praktik tax avoidance. Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan bagian dari tugas mereka untuk memaksimalkan laba dimana bisa saja terjadi penghindaran pajak didalam tugas mereka tersebut, 2 sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tetap saja tax avoidance terjadi.

Hasil ini sesuai penelitian Damayanti & Susanto (2015), Dewi & Jati (2014), Maharani & Suardana (2014) membuktikan kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

4.5.5 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti Hal ini berarti intensitas modal tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

Intensitas modal dalam penelitian ini merupakan gambaran seberapa besar dana perusahaan yang diinvestasikan pada aset tetap. Dalam perusahaan pertambangan aset tetap digunakan untuk kegiatan operasiional penambangan seperti pengerukan lahan, pengangkutan hasil tambang dan lain sebagainya. Semakin tinggi aset tetap menunjukkan kebutuhan aset tetap yang tinggi dalam kegiatan operasi perusahaan untuk meningkatkan produksi. Hubungan yang tidak signifikan antara intensitas modal dan penghindaran pajak dalam penelitian ini dapat disebabkan karena biaya depresiasi yang timbul dari kepemilikan aset tetap tidak mampu mengoptimalkan penghematan beban pajak. Disamping itu nilai kapitalisasi aset tetap cenderung lebih mahal dibandingkan dengan aset lain. Nilai kapitalisasi ini tidak sebanding dengan penghematan pajak yang diberikan melalui pemanfaatan nilai beban depresiasi yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Adisamartha & Noviani (2015), Siregar & Widyawati (2016) yang meragumetasikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap aset tetap. Tidak signifikannya pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dikarenakan beberapa perusahaan memiliki aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya sehingga tidak terjadi biaya penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Ardyansah & Zulaikha 2014). Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

4.5.6 Pengaruh Diversifikasi Gender Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa diversifikasi gender berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi diversifikasi gender akan mengurangi penghindaran pajak perusahaan.

Jika dikaitkan dengan teori feminisme, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Peningkatan prosentase wanita dalam eksekutif perusahaan memberikan dampak berbagai keputusan perusahaan termasuk dalam bidang perpajakan. Perusahaan berfokus pada pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja para manajemen untuk dapat berperilaku secara jujur dan mengutamakan tata kelola yang baik. Tidak sedikit perusahaan mengalami masalah yang menimbulkan polemik terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Diversitas perusahaan khususnya gender diperlukan untuk membatasi masalah tersebut. Dengan adanya perempuan sebagai dewan direksi diharapkan mampu memberikan pandangan secara luas dan cenderung menghindari resiko dalam pengambilan keputusan.

Khaoula & Mohamed Ali (2012) berpendapat terkadang perusahaan melewatkan berbagai bakat dan pengalaman perempuan ketika mewakili perusahaan. Hal ini mengakibatkan posisi perempuan pada dewan puncak menjadi minoritas, selama dekade terbaru telah ada minat yang meningkat pada *gender* eksekutif puncak dan direksi di perusahaan. Persentase perempuan dalam posisi manajemen puncak masih sangat rendah di kebanyakan negara. Peningkatan

prosentase wanita dalam eksekutif perusahaan memberikan dampak berbagai keputusan perusahaan termasuk dalam bidang perpajakan (Winasis et al., 2017).

Hasil ini sesuai penelitian Khaoula & Mohamed Ali (2012), Khumairoh et al. (2017) dan Winasis et al. (2017) membuktikan diversifikasi gender berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *corporate governance*, intensitas modal dan diversifikasi gender terhadap penghindaran pajak. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi proporsi komisaris independen akan mengurangi penghindaran pajak perusahaan.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti komite audit proporsi komisaris independen tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti kualitas audit Big Four akan mengurangi penghindaran pajak perusahaan.
4. Hasil penelitian ini membuktikan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti komite audit kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

5. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti intensitas modal tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.
6. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa diversifikasi gender berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi diversifikasi gender akan mengurangi penghindaran pajak perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan dengan periode penelitian hanya tiga tahun 2014 sampai dengan 2016 sehingga belum dapat menggeneralisasikan hasil penelitian.
2. Dari hasil analisis koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa ketujuh variabel independent dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 58,4%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independent belum dapat sepenuhnya mempengaruhi penghindaran pajak.

5.1 Saran

Saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan menambah sampel penelitian dengan jenis industri yang lain dan menambah periode penelitian sehingga diharapkan dapat menggeneralisasikan hasil penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independent yang digunakan seperti menambah variabel penelitian seperti likuiditas, manajemen laba, atau mekanisme GCG yang lain.

5.3 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait antara lain

1. Bagi Perusahaan

Implikasi dari penelitian ini yaitu bagi perusahaan diharapkan lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Bagi perusahaan emiten, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Melalui penelitian ini, perusahaan diharapkan menurunkan potensi penghindaran pajak sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan mereka, dan perusahaan emiten hendaknya juga mampu penghindaran pajak sehingga kinerja keuangan menjadi baik dimata investor dan perusahaan. Seperti pada hasil penelitian ini, apabila perusahaan ingin menurunkan penghindaran pajak perusahaan maka perusahaan dapat melakukan pmeningkatkan peranan GCG karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak

2. Bagi Investor

Bagi investor, diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan dan mempertimbangkan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, seperti GCG intensitas modal dan diversifikasi gender dalam berinvestasi. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam berinvestasi, investor agar mampu memilih perusahaan yang mengelola penghindaran pajak sehingga dapat menghasilkan return yang optimal dari perusahaan tersebut. Investor harus mengetahui tindakan-tindakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak seperti investor harus mengetahui bagaimana peranan perusahaan untuk menguji kewajaran perhitungan jumlah pajak yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Selain itu investor juga harus mengetahui mengenai proses peradilan oleh wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak, sebagai bentuk tekanan moral. Dengan mengetahui jalannya peradilan pajak, akan membuka mata publik bahwa perusahaan-perusahaan terkenal tersebut ternyata melakukan kecurangan untuk menghindari pajak.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak sehingga dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan penelitian yang sejenis. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, dimana variabel yang diteliti terdiri dari variabel yang masih belum konsisten dari penelitian sebelumnya dan variabel saran dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga membuktikan jika teori yang digunakan yaitu teori agency sudah sesuai dengan hasil pengujian

data. Menurut teori agency variabel-variabel independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan dari pengolahan data dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel independen penelitian terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu akuntansi keuangan, dimana hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambah bukti empiris faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak .

DAFTAR REFERENSI

- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1–14.
- Damayanti, F., & Susanti, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan, Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Dewi, N., Nasir, A., & Hariadi. (2016). Pengaruh Karakter Eksekutif , Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaraan Pajak (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011-2013). *JOM Fekon*, 3(1), 1006–1020.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *Chinese Economy*, 45(6), 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Francis, B., Hasan, I., Wu, Q., & Yan, M. (2014). Are Female CFOs Less Tax Aggressive? Evidence from Tax Aggressiveness. *Ssrn*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2474543>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance. In *SNA XV Banjarmasin* (pp. 1–31).
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Khaoula, A., & Mohamed Ali, Z. (2012). Demographic Diversity in the Board and Corporate Tax Planning in American Firms. *Business Management and*

Strategy, 3(1), 72–86. <https://doi.org/10.5296/bms.v3i1.1851>

- Khumairoh, F., Solikhah, B., & Yulianto, A. (2017). Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia. In *Simposium Nasional Akuntansi XX* (pp. 1–20).
- Kusumastuti, S., Supatmi, & Sastra, P. (2007). Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan Dalam Perspektif Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 88–98. Retrieved from <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/16819>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159.
- Mulyani, S., Darminto, & Wi Endang, M. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008-2012). *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 1–9.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(03), 408–421.
- Noviawan, R. A., & Septiani, A. (2013). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 1–10.
- Nuryati. (2015). Feminisme dalam Kepemimpinan. *Instibath*, XIV(16), 161–179.
- Okrayanti, T. Y., Utomo, S. W., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 5(Oktober), 804–817.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 1.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–13.
- Rahayu, N. (2011). Praktik Penghindaran Pajak oleh Foreign Direct Investment

- Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10, 171–180.
- Ridwan, Y., Zaitul, & Yulistia, R. (2015). Pengaruh Gender, Diversity dalam Dewan Komisaris , Dewan Komisaris Independen , Ukuran Dewan Komisaris. *E-Journal Universitas Bung Hatta*.
- Ristadelvina, C., & Puspaningsih, A. (2017). Analisis Determinan Penghindaran Pajak di Indonesia. In *Seminar Nasional Akuntansi XX* (pp. 1–17).
- Santosa, I., & Rahayu, N. (2013). *Corporate Tax Management: Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (Ortax).
- Sari, N., Kalbuana, N., & Jumadi, A. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Syariah Paper Accounting FEB UMS ISSN: 2460-0784*, 431–440.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 2202–2230.
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 135–136. Retrieved from perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Wibowo, E. (2010). Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 10(2), 129–138.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699–728.
- Winasis, S. E., Nur, E., & Yuyetta, A. (2017). Pengaruh Gender Diversity Eksekutif Terhadap Nilai Perusahaan , Tax Avoidance Sebagai Variabel Intervening : Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2015. *Diponegoro Jurnal of Accounting*, 6(1), 1–14.
- Zahirah, A., Nurazlina, & Rusli. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015). *JOM Fekon*, 4(1), 3543–3556.

Zulkarnaen, N. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *ESENSI Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(1), 105–118. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2335>

Situs :

Silalahi, M., Klara, I., & Anjar, A. (2016). *Jejak Korupsi Global dari Panama*. Retrieved from Tempo Investigasi: <https://investigasi.tempo.co/panama/>

Sugiharto, D. (2014). *Prahara Pajak Raja Otomotif*. Retrieved from Tempo Investigasi: <https://investigasi.tempo.co/toyota/>

LAMPIRAN 1
DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL

No	Kode	Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk
3	CTTH	Citatah Tbk
4	ELSA	Elnusa Tbk
5	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk
6	GEMS	Golden Energy Mines Tbk
7	INCO	Vale Indonesia Tbk
8	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
9	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk
10	MYOH	Samindo Resource Tbk
11	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
12	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk
13	TINS	Timah (Persero) Tbk
14	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk
15	DSSA	Dian Swastika Sentosa Tbk

LAMPIRAN 2

Hasil Perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR)

c	BEBAN PAJAK			LABA SEBELUM PAJAK			ETR		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ADRO	1,773,033,640,000	1,788,040,080,000	2,779,376,502,000	4,067,650,720,000	3,881,545,672,000	7,379,659,560,000	0.436	0.461	0.377
BSSR	33,275,398,212	291,854,238,856	110,328,665,034	65,092,050,562	505,794,489,120	480,602,219,265	0.511	0.577	0.230
CTTH	370,027,768	2,037,784,591	5,882,928,709	644,290,370	3,987,537,336	26,764,367,473	0.574	0.511	0.220
ELSA	141,609,000,000	127,993,000,000	102,252,000,000	559,701,000,000	507,738,000,000	418,318,000,000	0.253	0.252	0.244
ESSA	39,905,258,820	27,004,936,944	1,220,549,673	168,904,432,886	94,532,931,760	3,306,682,155	0.236	0.286	0.369
GEMS	51,854,211,562	8,268,905,520	4,705,079,841	185,676,112,789	23,180,344,584	660,522,686,208	0.279	0.357	0.007
INCO	808,379,320,000	267,949,528,000	44,006,277,000	2,962,111,362,000	968,095,392,000	69,742,995,000	0.273	0.277	0.631
ITMG	772,773,624,000	1,058,363,896,000	827,490,846,000	3,275,899,060,000	1,933,279,344,000	2,592,454,473,000	0.236	0.547	0.319
KKGI	59,612,411,460	72,506,266,072	110,116,775,958	159,656,891,016	125,954,855,920	198,357,382,125	0.373	0.576	0.555
MYOH	92,668,214,000	121,384,103,080	110,644,513,707	360,967,839,000	464,276,384,240	397,702,805,766	0.257	0.261	0.278
PTBA	601,983,000,000	54,562,000,000	36,883,000,000	2,674,726,000,000	2,718,358,000,000	2,733,799,000,000	0.225	0.020	0.013
RUIS	22,208,701,966	28,749,752,714	28,781,971,381	77,914,196,902	70,030,859,016	54,852,288,151	0.285	0.411	0.525
TINS	345,734,000,000	66,602,000,000	131,921,000,000	1,023,102,000,000	168,163,000,000	414,970,000,000	0.338	0.396	0.318
TOBA	226,245,205,942	185,643,146,928	153,899,375,763	673,823,106,950	542,282,000,008	350,864,558,079	0.336	0.342	0.439
DSSA	33,862,679,662	128,311,430,912	443,859,867,612	144,766,433,924	1,785,155,147,968	1,318,541,349,090	0.234	0.072	0.337

LAMPIRAN 3

Hasil Perhitungan Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI)

c	KOMISARIS INDEPENDEN			DEWAN KOMISARIS			PDKI		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ADRO	2	2	2	5	5	5	0.4	0.4	0.4
BSSR	2	3	3	7	8	8	0.286	0.375	0.375
CTTH	1	1	1	3	3	3	0.333	0.333	0.333
ELSA	2	2	2	5	5	5	0.4	0.4	0.4
ESSA	1	1	1	4	4	4	0.25	0.25	0.25
GEMS	3	3	3	6	6	4	0.5	0.5	0.75
INCO	3	3	3	10	10	10	0.3	0.3	0.3
ITMG	2	2	2	5	5	5	0.4	0.4	0.4
KKGI	2	2	2	5	5	5	0.4	0.4	0.4
MYOH	1	1	1	3	3	3	0.333	0.333	0.333
PTBA	2	2	4	6	6	6	0.333	0.333	0.667
RUIS	1	1	1	3	3	3	0.333	0.333	0.333
TINS	2	2	2	6	6	6	0.333	0.333	0.333
TOBA	2	2	1	3	3	3	0.667	0.667	0.333
DSSA	2	3	2	4	4	4	0.5	0.75	0.5

LAMPIRAN 4

Jumlah Komite Audit

c	KOMITE AUDIT		
	2014	2015	2016
ADRO	3	3	3
BSSR	2	3	3
CTTH	3	3	3
ELSA	3	3	3
ESSA	3	3	3
GEMS	3	3	3
INCO	3	3	3
ITMG	3	3	3
KKGI	3	3	3
MYOH	3	3	3
PTBA	3	3	3
RUIS	3	3	3
TINS	5	5	4
TOBA	3	3	3
DSSA	3	3	3

LAMPIRAN 5

Daftar Anggota Auditor

c	KUALITAS AUDIT			KUALITAS AUDIT		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ADRO	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	1	1	1
BSSR	Aria Kanaka dan Rekan	Aria Kanaka dan Rekan	Aria Kanaka dan Rekan	0	0	0
CTTH	Mirawati Sensi dan Rekan	Mirawati Sensi dan Rekan	Mirawati Sensi dan Rekan	0	0	0
ELSA	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	1	1	1
ESSA	Satrio Bing Eny dan Rekan	Satrio Bing Eny dan Rekan	Satrio Bing Eny dan Rekan	1	1	1
GEMS	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	1	1	1
INCO	Sidharta dan Widjaja	Sidharta dan Widjaja	Mirawati Sensi dan Rekan	1	1	0
ITMG	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	1	1	1
KKGI	Johan Malonda	Johan Malonda	Johan Malonda	0	0	0
MYOH	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	1	1	1
PTBA	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	1	1	1
RUIS	Amir Abadi Yusuf, Suryanto dan Rekan	Amir Abadi Yusuf, Suryanto dan Rekan	Amir Abadi Yusuf, Suryanto dan Rekan	0	0	0
TINS	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	1	1	1
TOBA	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	1	1	1
DSSA	Mirawati Sensi dan Rekan	Purwanto, Sungkoro, dan Surja	Mirawati Sensi dan Rekan	0	1	0

LAMPIRAN 6

Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional

c	SAHAM INSTITUSI			SAHAM BEREDAR			KEPEMILIKAN INSTITUSI		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ADRO	14,045,425,500	14,045,425,500	14,045,425,500	31,985,962,000	31,985,962,000	31,985,962,000	0.439	0.439	0.439
BSSR	680,290,000	680,290,000	2,374,242,774	2,616,500,000	2,616,500,000	2,616,500,000	0.260	0.260	0.907
CTTH	642,704,152	642,704,152	638,867,152	1,230,839,821	1,230,839,821	1,230,839,821	0.522	0.522	0.519
ELSA	3,652,703,300	3,687,175,000	3,000,000,000	7,298,500,000	7,298,500,000	7,298,500,000	0.500	0.505	0.411
ESSA	650,000,000	650,000,000	608,834,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0.591	0.591	0.553
GEMS	5,705,882,500	5,705,882,500	5,705,882,500	5,882,353,000	5,882,353,000	5,882,353,000	0.970	0.970	0.970
INCO	7,899,991,840	7,899,991,840	7,899,991,840	9,936,338,720	9,936,338,720	9,936,338,720	0.795	0.795	0.795
ITMG	735,092,000	736,071,000	736,071,000	1,129,925,000	1,129,925,000	1,129,925,000	0.651	0.651	0.651
KKGI	648,883,500	648,883,500	648,883,500	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0.649	0.649	0.649
MYOH	902,176,141	902,176,141	1,402,479,275	2,206,312,500	2,206,312,500	2,206,312,500	0.409	0.409	0.636
PTBA	1,498,087,500	1,498,087,500	1,498,087,500	2,304,131,850	2,304,131,850	2,304,131,850	0.650	0.650	0.650
RUIS	307,400,800	307,400,800	215,400,800	770,000,000	770,000,000	770,000,000	0.399	0.399	0.280
TINS	4,841,053,952	4,841,053,952	4,841,053,952	7,447,753,454	7,447,753,454	7,447,753,454	0.650	0.650	0.650
TOBA	1,874,455,000	1,874,455,000	1,874,455,000	2,012,491,000	2,012,491,000	2,012,491,000	0.931	0.931	0.931
DSSA	461,552,320	461,552,320	461,552,320	770,552,320	770,552,320	770,552,320	0.599	0.599	0.599

LAMPIRAN 7

Hasil Perhitungan Intensitas Modal (IM)

c	ASET TETAP			ASET			IM		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ADRO	20,210,770,706,000	20,340,026,904,000	20,851,157,061,000	80,183,427,296,000	82,610,432,456,000	88,070,036,271,000	0.252	0.246	0.237
BSSR	788,191,640,488	921,486,149,040	929,409,086,466	2,089,803,415,056	16,274,635,136,752	2,484,307,730,730	0.377	0.057	0.374
CTTH	61,647,100,463	232,121,353,124	224,906,807,944	366,053,299,896	605,667,034,867	615,962,000,265	0.168	0.383	0.365
ELSA	1,239,721,000,000	1,480,580,000,000	1,592,311,000,000	4,245,704,000,000	4,407,513,000,000	4,190,956,000,000	0.292	0.336	0.380
ESSA	790,299,065,122	1,201,488,082,024	1,492,285,260,270	1,748,137,944,826	3,852,056,001,248	9,036,444,010,524	0.452	0.312	0.165
GEMS	683,585,633,245	529,721,310,000	503,499,330,000	3,921,803,353,518	3,696,672,950,000	3,776,700,000,000	0.174	0.143	0.133
INCO	20,109,754,546	22,228,178,928	20,695,413,459	29,182,043,380	31,736,928,104	30,050,818,476	0.689	0.700	0.689
ITMG	3,571,671,376	1,896,008,753	3,021,917,388	16,344,464,696	16,336,824,632	16,335,821,376	0.219	0.116	0.185
KKGI	2,250,053,951,040	475,787,975,380	2,046,747,471,720	12,448,077,748,820	13,661,803,958,000	13,328,642,512,500	0.181	0.035	0.154
MYO H	976,929,045,000	951,437,754,408	759,792,826,338	2,031,097,095,000	2,235,330,277,576	1,988,374,299,786	0.481	0.426	0.382
PTBA	3,987,565,000,000	5,579,117,000,000	6,087,746,000,000	14,812,023,000,000	16,894,043,000,000	18,576,774,000,000	0.269	0.330	0.328
RUIS	507,593,258,183	474,338,230,928	443,475,154,491	1,264,142,659,644	1,091,753,891,437	979,132,450,762	0.402	0.434	0.453
TINS	2,017,066,000,000	2,224,368,000,000	2,221,103,000,000	9,752,477,000,000	9,279,683,000,000	9,548,631,000,000	0.207	0.240	0.233
TOBA	599,109,717,220	677,240,123,664	639,899,824,368	3,758,229,245,484	3,914,800,375,368	3,532,224,910,977	0.159	0.173	0.181
DSSA	6,937,165,731,454	5,402,146,724,208	5,705,466,501,756	16,283,833,033,986	27,702,578,997,328	31,495,842,156,030	0.426	0.195	0.181

LAMPIRAN 8

Daftar Diversifikasi Gender

c	GENDER		
	2014	2015	2016
ADRO	0	0	0
BSSR	0	1	1
CTTH	1	1	1
ELSA	0	0	0
ESSA	0	0	0
GEMS	0	1	1
INCO	1	1	1
ITMG	1	1	1
KKGI	0	0	0
MYOH	0	0	0
PTBA	0	0	0
RUIS	1	1	1
TINS	0	0	0
TOBA	0	0	0
DSSA	1	1	1

LAMPIRAN 9

Hasil Perhitungan *Return on Assets* (ROA)

c	LABA BERSIH			ASET			ROA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ADRO	2,294,617,080,000	2,093,505,592,000	4,600,283,058,000	80,183,427,296,000	82,610,432,456,000	88,070,036,271,000	0.029	0.025	0.052
BSSR	31,816,652,350	365,678,597,000	370,273,554,231	2,089,803,415,056	16,274,635,136,752	2,484,307,730,730	0.015	0.022	0.149
CTTH	1,014,318,138	1,949,752,745	20,881,438,764	366,053,299,896	605,667,034,867	615,962,000,265	0.003	0.003	0.034
ELSA	418,092,000,000	379,745,000,000	316,066,000,000	4,245,704,000,000	4,407,513,000,000	4,190,956,000,000	0.098	0.086	0.075
ESSA	128,999,174,066	67,527,994,816	2,086,132,482	1,748,137,944,826	3,852,056,001,248	9,036,444,010,524	0.074	0.018	0.000
GEMS	133,821,901,227	20,887,810,000	349,882,480,000	3,921,803,353,518	3,696,672,950,000	3,776,700,000,000	0.034	0.006	0.093
INCO	2,153,732,042	700,145,864	25,736,718	29,182,043,380	31,736,928,104	30,050,818,476	0.074	0.022	0.001
ITMG	2,503,125,436	874,915,448	1,764,963,627	16,344,464,696	16,336,824,632	16,335,821,376	0.153	0.054	0.108
KKGI	1,000,444,795,560	786,395,610,320	1,279,120,825,920	12,448,077,748,820	13,661,803,958,000	13,328,642,512,500	0.080	0.058	0.096
MYOH	268,299,625,000	333,963,825,195	287,058,292,059	2,031,097,095,000	2,235,330,277,576	1,988,374,299,786	0.132	0.149	0.144
PTBA	2,019,214,000,000	2,037,111,000,000	2,024,405,000,000	14,812,023,000,000	16,894,043,000,000	18,576,774,000,000	0.136	0.121	0.109
RUIS	55,705,494,936	41,281,106,302	26,070,316,770	1,264,142,659,644	1,091,753,891,437	979,132,450,762	0.044	0.038	0.027
TINS	637,954,000,000	1,062,657,000,000	251,969,000,000	9,752,477,000,000	9,279,683,000,000	9,548,631,000,000	0.065	0.115	0.026
TOBA	44,757,790,101	356,638,853,080	196,965,182,316	3,758,229,245,484	3,914,800,375,368	3,532,224,910,977	0.012	0.091	0.056
DSSA	110,903,754,262	1,656,843,717,056	874,681,481,478	16,283,833,033,986	27,702,578,997,328	31,495,842,156,030	0.007	0.060	0.028

Lampiran 10

Tabel 4.2

Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	45	,01	,63	,3345	,15090
PDKI	45	,25	,75	,3997	,12402
KA	45	2,00	5,00	3,0889	,46818
KAP	45	1,00	1,00	,6444	,48409
INST	45	,26	,97	,6151	,19132
IM	45	,03	,70	,3048	,15750
GD	45	,00	1,00	,3778	,49031
ROA	45	,00	,15	,0627	,04679
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Data Diolah, 2018

Lampiran 11

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08923142
	Absolute	,117
Most Extreme Differences	Positive	,046
	Negative	-,117
Kolmogorov-Smirnov Z		,786
Asymp. Sig. (2-tailed)		,567

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah, 2018

Lampiran 12

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinieritas

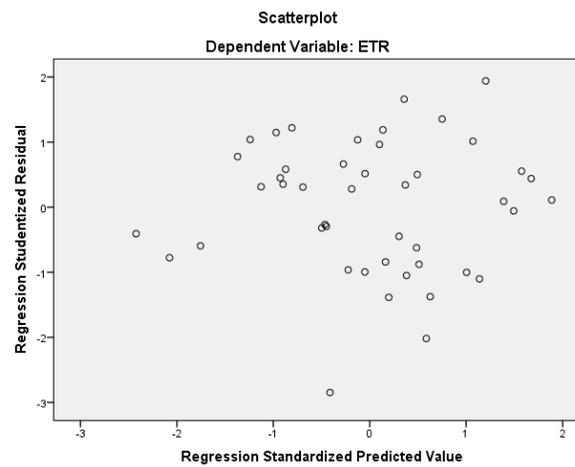
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PDKI	,655	1,526
KA	,866	1,155
KAP	,696	1,437
INST	,751	1,331
IM	,790	1,267
GD	,736	1,358
ROA	,855	1,170

Sumber : Data diolah, 2018

Lampiran 13

Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Diolah, 2018

Lampiran 14

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,806 ^a	,650	,584	,09731	1,973

a. Predictors: (Constant), ROA, IM, INST, KA, GD, KAP, PDKI

b. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data Diolah, 2018

Lampiran 15

Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,684	,130		5,245	,000
PDKI	-,383	,146	-,315	-2,621	,013
KA	,005	,034	,014	,139	,890
KAP	-,144	,036	-,463	-3,975	,000
INST	,064	,088	,081	,718	,477
IM	-,221	,105	-,231	-2,111	,042
GD	-,086	,035	-,280	-2,468	,018
ROA	-,915	,339	-,284	-2,697	,010

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data Diolah, 2018

Lampiran 16

Tabel 4.9

Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,684	,130		5,245	,000
PDK1	-,383	,146	-,315	-2,621	,013
KA	,005	,034	,014	,139	,890
KAP	-,144	,036	-,463	-3,975	,000
1 INST	,064	,088	,081	,718	,477
IM	-,221	,105	-,231	-2,111	,042
GD	-,086	,035	-,280	-2,468	,018
ROA	-,915	,339	-,284	-2,697	,010

Sumber : Data Diolah 2018

